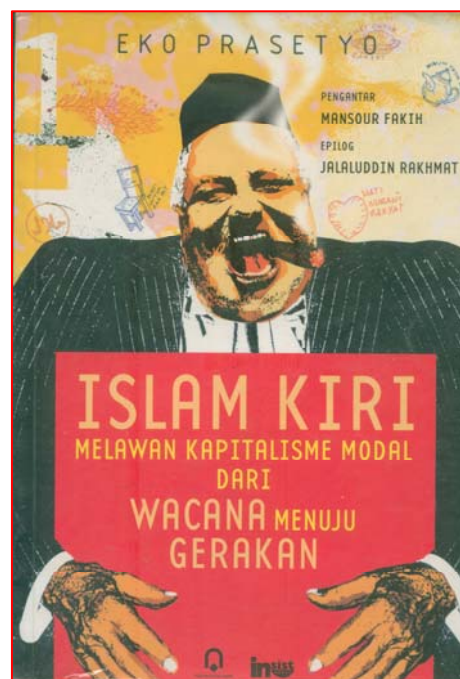


ISLAM KIRI: MELAWAN KAPITALISME MODAL DARI WACANA MENUJU GERAKAN

Eko Supriyadi

LISENSI DOKUMEN

Copyleft: Digital Journal Al-Manar. **Lisensi Publik**. Diperkenankan untuk melakukan modifikasi, penggandaan maupun penyebarluasan artikel ini kepentingan pendidikan dan bukannya untuk kepentingan komersial dengan tetap mencantumkan atribut penulis dan keterangan dokumen ini secara lengkap.



ISLAM KIRI
MELAWAN KAPITALISME MODAL
DARI WACANA MENUJU GERAKAN

Penulis : Eko Prasetyo
Pengantar : Dr. Mansour Fakih
Tebal buku : 365 halaman
Penerbit : Insists Press & Pustaka Pelajar

KETIDAKBERDAYAAN ISLAM MEWARNAI GERAK SEJARAH

Realitas yang tampak di depan mata percaturan dunia saat ini menunjukkan betapa umat Islam berada pada posisi marginal, tertindas, dan subordinat. Permasalahan utama yang muncul pada umat Islam pada umumnya terkait dengan faktor keterbelakangan ekonomi, sosial, dan instabilitas politik. Upaya kritis untuk menyelesaikan permasalahan ini mendesak untuk dilakukan demi menyelamatkan Islam dari kemunduran dan benturan bertubi-tubi dari arus global. Tumpuan utama kemunduran tersebut jelas berawal dari kemiskinan yang melanda sebagian besar masyarakat di negeri-negeri Muslim sendiri. Efek domino atas fenomena kemiskinan muncul dalam beragam wajah dan gejala, dari kemerosotan moral, kriminalitas, masalah kesehatan, kedaulatan dan independensi negara, bahkan sampai menghambat aktivitas ritual keberagamaan umat.

Sebelum menuju gagasan alternatif untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka perlu terlebih dulu dilakukan pemetaan corak pandangan kaum Muslim sendiri terhadap permasalahan kemiskinan. Setidaknya ada beberapa sudut pemikiran terhadap kemiskinan, yaitu tradisional, modernis, liberal, revivalis, dan transformatif.

Pemikiran *tradisional* percaya bahwa permasalahan kemiskinan umat pada hakekatnya adalah ketentuan dan rencana Tuhan. Masalah kemiskinan dan marginalisasi tidak jelas kaitannya dengan globalisasi dan neoliberalisme. Ia justru dianggap sebagai ujian atas keimanan seorang yang tidak diketahui manfaat dan mudharatnya, ataupun petaka di balik kemajuan dan pertumbuhan serta globalisasi bagi umat manusia dan lingkungannya kelak. Akar teologisnya bersandar pada konsepsi sunni tentang predeterminisme (takdir), ketentuan dan rencana Tuhan sebelum manusia diciptakan. Hal

ini terutama dianut oleh golongan *assyariah*, mereka menganggap manusia tidak memiliki *free will* untuk menciptakan sejarah mereka sendiri.

Pemikiran kaum *modernis* maupun *liberal* terhadap kemiskinan dan keterbelakangan pada dasarnya sepaham dengan pemikiran modernisasi sekuler. Mereka percaya bahwa masalah yang dihadapi kaum miskin pada dasarnya berakar pada sikap mental yang salah, budaya yang tidak mendukung atau wacana teologi mereka. Bukan dilihat dari struktur kelas, gender dan sosial sebagai pembentuk nasib masyarakat. Bagi mereka, umat harus berpartisipasi dan mampu bersaing dalam proses industrialisasi dan globalisasi serta proses pembangunan. Kemiskinan tidak ada sangkut pautnya dengan neoliberalisme dan globalisasi. Kalau perlu justru umat Islam dipersiapkan untuk menjadi liberal agar mampu bersaing dalam globalisasi. Pandangan ini berakar dari pemikiran para reformis seperti Muhammad Abduh Mesir dan Mustafa Attaturk di Turki serta beberapa pembaharu lainnya. Asumsi dasar mereka adalah bahwa keterbelakangan umat karena umat Islam melakukan sakralisasi terhadap semua aspek kehidupan.

Paradigma *revivalis* sering dilabeli dengan istilah fundamentalisme. Ia melihat faktor ke dalam dan keluar sebagai akar penyebab persoalan kemiskinan dan kemunduran umat Islam. Penyebabnya adalah karena semakin banyak umat yang memakai ideologi lain sebagai pijakan ketimbang Al-Qur'an sendiri. Globalisasi dan politik bagi mereka hanyalah agenda Barat dan konsep non Islami yang dipaksakan oleh masyarakat non Muslim. Mereka menganggap telah dipinggirkan oleh apparatus developmentalis dan globalisasi. Resistensi yang dilakukan mereka dengan menerbitkan buku-buku mengorganisir kelompok diskusi dikalangan mahasiswa, menciptakan simbolisasi dalam bentuk cara berpakaian atau proyek percontohan system kemasyarakatan dan ekonomi tertutup atas Kapitalisme.

Paradigma *transformatif* adalah pikiran alternative dari ketiga yang lainnya. Baginya, kemiskinan disebabkan oleh ketidakadilan system dan struktur ekonomi, politik dan budaya. Keadilan menjadi prinsip fundamental dari paradigma ini. Fokus kerjanya adalah selain mencari akar teologi, metodologi, dan aksi yang memungkinkan terjadinya transformasi sosial. Pemihakan terhadap kaum miskin dan tertindas (dhu'afa) tidak hanya diilhami oleh Al-Qur'an, tetapi juga hasil analisis kritis terhadap struktur yang ada. Islam bagi kelompok ini dipahami sebagai agama pembebasan bagi yang tertindas, serta mentransformasikan sistem eksploitasi menjadi sistem yang adil. Dan inilah yang

mendasari gerakan *Islam kiri* untuk mengambil posisinya dalam menghadapi problem sosial yang dihadapi umat saat ini.

Umat Islam, terutama kelompok miskin tertindas, di era globalisasi kapitalisme akan menghadapi gelombang kemiskinan struktural yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Golongan Muslim miskin membutuhkan teologi, paradigma dan analisis sosial yang memihak pada mereka, itulah teologi bagi kaum tertindas, teologi yang membebaskan mereka dari ketertindasan dan eksploitasi global. Bagi golongan miskin dan marginal, kehadiran globalisasi lebih membawa ancaman ketimbang berkah.

Sebuah teologi yang memberi ruang bagi pembelaan kaum tertindas sangat diperlukan dengan membentuk gerakan sosial (*social movements*). Tantangan terbesar yang dihadapi adalah dukungan masa atas legitimasi teologis ini. Islam kiri dalam kenyataannya tergolong kecil dari segi jumlah dan cenderung ada jarak dengan masyarakat. Tantangan lain adalah kuatnya paradigma dominan penganut globalisasi neoliberalisme yang telah berhasil menundukkan pemerintah dan Negara, melalui infiltrasi gagasan pasar bebas atas setiap kebijakan negara sehingga mampu melindungi kepentingan mereka.

Dalam sejarah keagamaan telah dibuktikan, bahwa sebuah agama bisa menyalakan revolusi dan meruntuhkan kekuasaan korup. Iman dalam konteks ini adalah proses internal kenyataan dan dorongan menuju perubahan dan bukan mencari penyesuaian atas realita yang ada. Jangan sampai agama justru dimanfaatkan untuk mempertahankan dan mendukung status quo. Sikap keagamaan yang berlabel kiri ini mengandung makna bahwa Islam adalah agama yang meletakkan kaum yang terdzalimi sebagai pihak pertama yang harus dibela, dilindungi dan diperjuangkan. Islam kiri bukan berarti ingin menegakkan kediktatoran atau perombakan terhadap doktrin keagamaan yang ada, melainkan lebih pada upaya untuk melakukan interpretasi dari sudut pandang khusus yang justru sangat dibutuhkan keberadaannya namun banyak dilupakan oleh sebagian besar umat Islam, yaitu untuk tujuan menegakkan keadilan bagi seluruh umat manusia.

Dalam kenyataannya kesadaran teologis umat belum menyentuh berdampak secara langsung terhadap kaum lemah. Gagasan egaliterisme ekonomi tidak masuk dalam khasanah teologi sebagian besar umat lantaran kekayaan sebagian orang Islam begitu besar, di sisi lain ketimpangan itu menimpa sebagian besar umat Islam yang jatuh dalam penderitaan. Di sini agama telah kehilangan peran revolusioner nya karena menjadi

sekedar perkakas untuk sebuah pagelaran diskusi, paling yang berminat, akan menjadikan agama sebagai komoditi seni yang menghibur. Sementara itu tujuan akhir Islam, sebagaimana Sayyid Qutb, membangkitkan kemanusiaan manusia, membangunnya, menyegarkan, dan mengibarkan kejayaan dan membuatnya dominan dalam segala aspek kehidupan.

Untuk membangkitkan kesadaran kritis, umat perlu menoleh sejarah nabi, dimana mereka diutus untuk melawan segala bentuk penindasan dan kesewenangan penguasa. Mereka muncul untuk mengenalkan pada masyarakat tentang nilai-nilai keadilan yang terus ditelikung oleh kepentingan penguasa. Bahkan penolakan para pembesar Quraisy terhadap ajaran Muhammad, salah satu motifnya karena agama ini diikuti oleh orang miskin yang derajadnya disejajarkan dengan golongan lain. Jika Muhammad hanya mengajarkan ke-Esaan Tuhan tanpa menyerang tatanan ekonomi dan sosial yang pincang serta tidak melarang riba secara keras, mudah saja suku Quraisy menerima Islam. Perlawanan keras yang dilancarkan kaum Mekah bukan karena sikap keras Quraisy terhadap ajaran Nabi, melainkan karena factor ekonomi dan politik, dimana mereka khawatir ajaran Muhammad akan mengancam asset ekonomi yang mereka kuasai. Muhammad ditakutkan akan membangun bentuk kekuasaan politik yang baru dalam masyarakat oligarki yang telah ada. Sementara itu Islam di tangan Muhammad menjadi kekuatan yang memberantas segala kesewenangan sehingga melaluinya sejarah tentang harta mulai dirombak. Hal ini didasarkan karena harta dalam Islam juga dapat melalaikan manusia dari ajaran Allah (QS.63:9), memandang bahwa Islam harta harus memiliki fungsi social.

Nabi sadar bahwa bahasa bisnis dan ekonomi lebih mudah dipahami oleh manusia dimanapun, karena manusia memiliki dorongan untuk mencari keuntungan. Sehingga bahasa tersebut dipakai untuk media menyampaikan pesan, ayat-ayat Al-Qur'an pun juga menyebut banyak kosa kata bernuansa ekonomi, seperti perdagangan, bangkrut, untung, rugi, kekayaan, kemiskinan dsb. Demi membela kaumnya, Muhammad lebih memilih memimpin kaum tertindas dan mengambil gaya hidup seperti mereka. Daya tarik Islam bukan hanya pada isi wahyunya, melainkan didukung oleh semangat hidup dari pemimpinnya. Dalam posisi seperti itulah dimensi-dimensi revolusioner Islam untuk pembebasan secara sistematis telah dituangkan. Di sini Islam memiliki tiga prinsip penting kekuatan social, yaitu:

1. Islam mendasarkan dakwahnya untuk aksi menuju perubahan positif. Belenggu struktur menjadi perhatian utama dengan mengandalkan salah satunya pada keimanan subyektif dalam diri setiap pribadi.
2. Keyakinan akan keunggulan dan kebenaran Islam sebagai satu-satunya agama, dengan ini segala pemecahan atas segala permasalahan dapat dicari alternatifnya.
3. Islam adalah *rahmatan lil alamin*, bersikap terbuka dan memberikan pencerahan kehidupan manusia. Pemihakan diberikan kepada kebenaran, bukan pada pemegang asset ekonomi, penyandang kekuasaan, dan petinggi masyarakat, melainkan seluruh lapisan umat, utamanya mereka yang hak-haknya terampas.
4. Islam memiliki hubungan yang erat dengan ummat secara langsung, diharapkan mampu mewujudkan sebuah metodologi bagi perubahan sejarah.

IMPERIALISME MODAL MENGGENCET DUNIA ISLAM

Jatuhnya kekuasaan politik Islam ditandai dengan ambruknya tiga kerajaan Islam baru pada abad ke-16, yaitu *utsmaniyyah* di Asia kecil, Anatolia, Irak, Suriah, dan Afrika Utara; *safawiyah* di Iran; dan Mongol di India. Sejak kemundurannya, secara berangsur negeri-negeri tersebut dibanjiri penetrasi modal dari kaum kolonialis. Penetrasi modal pertama kali adalah pembuatan terusan Suez yang membawa bencana bagi kehidupan ekonomi dan sosial mesir. Setelah itu berangsur pula penetrasi pada negara Iran, Aljazair, Tunisia dan negeri muslim lainnya. Kepemimpinan Islam tampak sebagai kumpulan aristokrat yang sukses menjadi elit tetapi pandangan politiknya konservatif. Potensi revolusioner telah lumpuh oleh pembangunan yang bernuansa kapitalistik di negeri mereka.

Dari kekalahan negeri-negeri Islam tersebut akhirnya merubah hubungan ekonomi politik antara negara Muslim dan bukan Muslim. Nyatalah bahwa system ekonomi dunia yang hidup saat ini bercorak eksploitatif. Setidaknya terdapat beberapa karakteristik yang membuktikan hal ini, yaitu:

1. *Promethean*, yaitu menuju suatu penguasaan tanpa batas atas kekuatan materi untuk kepentingan manusia. Sejak revolusi industri, Kapitalisme telah menancapkan kakinya untuk mengubah dunia menjadi alat pemenuhan hasrat dan ambisi.

2. *Productiviste*, yaitu memproduksi barang dan jasa sekaligus melipatgandakannya tanpa batas rasional kebutuhan manusia. Tuntutan untuk mengkonsumsi terus menerus suatu produk selalu dipropagandakan demi keuntungan kapitalisme.
3. *Expansionisme*, yaitu perluasan akses terhadap keberlangsungan hidup kapitalisme. Di sini resources merupakan sasaran yang selalu diburu meskipun dengan cara-cara kotor, seperti pembantaian suatu etnis dan penjajahan dan bentuk nekolim lainnya, termasuk di dalamnya adalah penaklukan budaya masyarakat agar tunduk sebagai konsumen setia produk-produk kapitalisme.
4. *Marchand*, yaitu system ekonomi dunia yang berjalan melalui perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Keempat ciri ini bersinergi untuk menciptakan proses akumulasi kapital dalam skala besar. Proses akumulasi modal oleh Kapitalisme global kemudian menempuh langkah-langkah strategis yang sangat merugikan negeri-negeri Muslim. Mereka mempergunakan serangkaian issue yang pada dasarnya bertujuan membuka akses Kapitalisme yang lebih luas tanpa hambatan. Senjata-senjata penghancur negeri muslim yang dilakukan AS dan sekutunya antara lain adalah:

1. Isu terorisme sebagai jagal terhadap setiap negara yang tidak mematuhi kebijakan AS. Disini Osama bin Laden dengan Al Qaeda direkayasa sebagai symbol institusi teroris. Momok terorisme kemudian disusupkan ke dalam konstruk berfikir masyarakat dunia, bahkan beroperasi melalui jaringan pemerintahan dan secara tidak langsung pada umat Islam sendiri. Penerapan ISA Malaysia, dan UU antiterorisme digalakkan di negeri-negeri Muslim merupakan bukti bahwa negeri Muslim sendiri ketakutan dengan ancaman hantu terorisme sehingga ikut melegitimasi proyek pembantaian massal AS. Dengan isu terorisme, gerakan Islam yang semula menjadi lapisan oposisi yang disegani mulai diringkus dan dilabeli sebagai kelompok garis keras. Dengan demikian gerakan antiterorisme bukan lagi murni kemanusiaan melainkan tak lebih dari manuver politik yang hendak memfungsikannya sebagai pengawas dan mendisiplinkan tatanan sesuai keinginan Negara Barat. Artinya, terorisme membuat system kekuasaan internasional dapat berjalan secara optimal dan politik pasar akan menuai sukses.
2. Isu HAM. Dengan dalih penegakan HAM maka banyak negeri muslim dihajar embargo ekonomi dan politiknya yang berakibat pada penderitaan rakyatnya.

Sejarah paling tragis pelanggaran hak asasi atas kemerdekaan berdaulat sekaligus kekalahan umat Islam dunia adalah pendirian Negara zionis Israel yang dilegitimasi oleh AS dan sekutu baratnya.

3. Isu demokrasi yang (sesungguhnya) ambivalen. Dengan beralih demokrasi maka AS gemar melakukan justifikasi dan vonis atas berbagai kasus internasional. Standar ganda dan diskriminasi adalah ciri khas gaya AS. AS dianggap bukan sebagai negara yang adil dan konsisten menegakkan hukum internasional. AS sudah terlalu kasar untuk bersembunyi dari kedok-kedok ini. Banyak kasus pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan zionisme Israel dan sekutu AS malah dilegitimasi, sebaliknya terhadap negeri-negeri muslim AS tampil sebagai polisi dunia yang bertindak bijak menegakkan hukum internasional. Dalam konteks ini AS lagi-lagi memanfaatkan hak veto-nya untuk memutuskan setiap kebijakan internasional yang berlawanan dengan misi AS.
4. Homogenisasi kebudayaan. AS telah berhasil mendominasi berbagai institusi kebudayaan yang selalu mempropagandakan peradaban universal, padahal jika ditilik hal itu hanyalah proyek homogenisasi kebudayaan ke seluruh dunia, yang dengan itu proyek Kapitalisme menuai kemenangannya.
5. Memanfaatkan badan ekonomi dunia. AS bersama pemerintah Negara Barat memainkan peran penting dalam jaringan institusi birokrasi dan kekuatan multilateral lain yang mewujud kedalam badan-badan ekonomi dan perdagangan dunia, seperti IMF, IGGI, CGI, WORLD BANK, WTO, dll . Melalui bantuan dalam bentuk utang, Barat berusaha mendikte negeri-negeri muslim untuk mematuhi tuntutan mereka.

Kapitalisme, bagaimanapun telah membawa dampak buruk yang tak bisa dielakkan merugikan umat manusia. Sejak datangnya kapitalisme, dunia mengalami musibah-musibah besar, seperti masalah kerusakan lingkungan, lobang ozon, gas rumah kaca, penggundulan hutan, bencana alam, penyakit-penyakit baru, transformasi kebudayaan yang bercorak homogenik, dan kejahatan social merajalela.

Kapitalisme telah berhasil membangun sekat-sekat yang rapi dengan meletakkan fungsi dan kedudukan agama ke dalam wilayah yang sangat pribadi. Nilai-nilai ekonomi diunggulkan ketimbang nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan. Dari sini

muncullah golongan sosial baru sebagai akibat sistem yang eksploitatif tersebut, yaitu kelas sosial dengan pendapatan rendah yang diperoleh dari perburuhan tenaga oleh institusi ekonomi Kapitalisme. Kapitalisme mengusung demokrasi dan liberalisme, akan tetapi wacana ini hampir mustahil diwujudkan dalam tatanan ekonomi yang timpang. Slogan persamaan dan kebebasan akhirnya hanya hadir untuk kalangan kelas sosial atas, tetapi sebaliknya yang terjadi untuk kelas sosial bawah.

Mesin birokrasi diciptakan sesungguhnya juga merupakan cara Kapitalis untuk menjaga berlangsungnya akumulasi modal secara terus-menerus dan mempertahankannya dari berbagai hambatan teknis dan administrative dengan cara menetapkan aturan-aturan yang harus ditaati bagi seluruh komponen proyek Kapitalisme. Dengan modal tersebut maka kekuasaan dapat dikendalikan. Dengan modal pula hukum dapat direkayasa sesuai kepentingan pemilik modal. Mereka melakukan kontrol efektif agar kepentingan ekonomi tetap menguntungkan kelas berkuasa. Mereka mempertahankah “harmonisasi” antar kelas-kelas dalam masyarakat dengan ikut menengahi konflik-konflik kelas yang acap kali muncul sehingga keberadaan tatanan yang mereproduksi dan melestarikan ekonomi borjuis selalu terjaga.

Dalam prakteknya, pembangunan Indonesia yang telah dipraktekkan negeri ini lebih bernuansa neoliberal. Berikut ini adalah bukti nyata pengalaman kebijakan pemerintah Indonesia yang terbukti berwatak neoliberal;

<i>KEBIJAKAN</i>	<i>TUJUAN</i>	<i>IMPLIKASI NYATA</i>
Pemotongan subsidi dan belanja pemerintah.	Mengurangi permintaan yang berlebihan dan mengurangi anggaran belanja negara.	Terjadi pemotongan anggaran belanja dan subsidi untuk pendidikan, pelayanan kesehatan, sanitasi, penyediaan air bersih, pengairan, tenaga listrik, pembangunan sarana jalan dan transportasi. Hasilnya angka kematian bayi dan ibu sangat tinggi karena pelayanan kesehatan mahal. Jumlah mereka yang putus sekolah besar akibat mahalnya ongkos pendidikan. Tingginya angka

<p>Kenaikan angka suku bunga.</p>	<p>Alokasi sumber daya modal kepada para penanam modal yang sangat efisien saja.</p>	<p>kecelakaan karena minimnya dana perawatan angkutan bagi kendaraan untuk mereka yang miskin; kecelakaan kereta ekonomi paling tinggi angkanya.</p> <p>Kredit pada kenyataannya digunakan oleh pemilik bank dan dimanfaatkan untuk penggunaan yang konsumtif dan berakhir dengan kemacetan yang ujung-ujungnya adalah menumpuknya utang sektor swasta. Efek lain ketentuan ini adalah berkurangnya akses bagi pengusaha kecil dan petani-nelayan terhadap kredit dan memicu inflasi sekaligus mendorong munculnya spekulasi.</p>
<p>Penurunan tariff dan kuota impor.</p>	<p>Peningkatan daya saing di pasar internasional dan meningkatkan efisiensi.</p>	<p>Diabaikannya industri-industri lokal, mengurangi kemampuan swasembada pangan dan justru meningkatkan impor barang mewah sementara rakyat miskin tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasar mereka.</p>
<p>Swastanisasi perusahaan-perusahaan negara.</p>	<p>Menjadikan perusahaan lebih efisien dan dapat berkompetisi dalam masyarakat internasional.</p>	<p>Prasarana dan sarana publik beralih tangan ke sektor-sektor swasta yang hanya mementingkan perolehan laba ketimbang kesejahteraan sosial masyarakat dan ongkos pelayanan publik menjadi mahal sehingga tak terjangkau rakyat miskin.</p>
<p>Revolusi hijau sektor pertanian.</p>	<p>Peningkatan produksi pangan, khususnya padi,</p>	<p>Asupan kimia yang tidak terkontrol telah menyebabkan serangan hama pada tanaman pangan bahkan menimbulkan kerusakan</p>

	melalui teknik asupan, yang berupa bibit unggul, aplikasi pupuk buatan, pestisida dll.	lingkungan yang parah; penggunaan teknologi membuat banyak tenaga kerja tersingkir dan harga pangan rendah karena produksi berlimpah yang berujung pada kemiskinan pada kaum tani.
Penghapusan hambatan terhadap perusahaan asing (investor) yang masuk.	Dapat membawa masuk modal produktif, membuka lebar peluang kerja, membantu industrialisasi dan membentuk jaringan pasar.	Terjadi de-nasionalisasi dimana kepemilikan asing terhadap kekayaan negara meningkat pesat; tingginya impor barang setengah jadi dan barang modal; besarnya aliran keuntungan dan pendapatan investasi yang keluar dimana mengarah pada proses de-kapitalisasi (capital flight); menciptakan instabilitas moneter.
Penerapan sistem hukum patent.	Sistem hukum yang memberikan perlindungan dan jaminan atas hak milik atas tanah, kapital, bangunan, temuan-temuan bahkan budidaya tanaman.	Monopoli pada penguasaan asset-aset kekayaan publik, bahkan patent pada tanaman telah berdampak langsung pada monopoli hasil-hasil pertanian oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional; negara harus membayar jika harus menggunakan kekayaannya sendiri yang sudah dipatentkan oleh orang asing.

Kenyataan ini berakibat pada; negara, sebagaimana ungkahan Nicos Poulantzas, mengambil fungsi sebagai penjaga stabilitas politik dan pada masyarakat kapitalis, keadaan ini menjadi kunci bagi terjaminnya akumulasi modal. Sebab bangunan Kapitalisme hanya berjalan menurut *fred block*, adanya dua kondisi penting, yaitu pengembangan modal (capital accumulation), dan Kapitalisme yang mampu memproduksi dirinya, karenanya eksistensi

negara kapitalis tergantung pada apakah sistem tersebut bisa memberi peluang pengembangan modal.

Dalam fungsi seperti inilah negara dalam masyarakat Kapitalisme internasional menjabarkan fungsi-fungsinya seperti ini:

1. Menciptakan kondisi sehingga pengembangan modal mampu berjalan lancar, baik bagi pengusaha nasional maupun bisnis asing. Hal ini biasa disebut sebagai *business confidence*.
2. Memeratakan kekayaan secukupnya supaya kaum buruh bisa mereproduksi dirinya, dan supaya kaum buruh percaya bahwa mereka telah diperlakukan secara adil sehingga mereka tidak membuat keributan yang dapat merusak suasana bisnis yang baik.
3. Berperan sebagai polisi untuk mencegah gangguan terhadap sistem yang ada, serta mengembangkan suatu ideologi yang membuat kaum buruh merasa diperlakukan adil dalam sistem yang sebenarnya menguntungkan kaum kapitalis. Dengan teori ini maka Kapitalisme internasional telah mengubah sistem dan peran sebuah negara dari kendali oleh rakyat kepada kendali kapitalis.

Akumulasi modal dan pembangunan industri berwatak eksploitatif ini menjadi lebih besar ketika ia memanfaatkan tiga unsur penopang, yaitu:

1. modal asing.
2. pemerintah dunia ketiga
3. borjuasi lokal

Tiga langkah ini juga diusung dalam berbagai media strategis dan penerapan kebijakan. Demikian pula, berbagai perguruan tinggi maupun LSM secara serempak membangun pusat kajian baru yang dikenal dengan *Development Studies*. Melalui development studies ini proses penyebarluasan gagasan Kapitalisme di penjuru dunia menjadi dipercepatkan. Yakni melalui teknokrat, intelektual dan bahkan aktivis LSM dari dunia ketiga yang menjadi pasar utama proyek tersebut (seperti lembaga dana internasional, universitas, lembaga riset, badan perencanaan pembangunan). Secara terkonsolidasi mereka menentukan apa yang harus dibicarakan, dipikirkan, diidamkan, dan diarahkan menuju gagasan developmentalisme.

Posisi borjuasi lokal dalam hal ini adalah mereka yang memiliki kedekatan hubungan dengan penguasa, ia mendapat hak-hak istimewa khususnya dalam pengenaan tariff, tingginya subsidi pemerintah, dan pemberian konsensi yang sangat besar. Ia kemudian mempengaruhi berbagai bentuk peraturan khususnya dalam kaitan dengan pembatasan investasi asing.

Nasionalisme juga merupakan ideologi yang dijadikan selubung bagi kepentingan borjuasi lokal untuk menumpuk keuntungan. Dalam konteks ini maka pemodal memiliki kekuasaan veto atas negara, dan pemimpin negara. Beberapa program yang mengatasnamakan kepentingan umum sesungguhnya merupakan kegiatan yang berorientasi penumpukan modal. Sehingga mereka menjalankan program pembangunan sembari menelantarkan kehidupan rakyat.

Kasus korupsi di Indonesia sesungguhnya adalah biang kebobrokan dan kebangkrutan bangsa ini. Dalam hitungan riil, jika hutang Indonesia harus ditanggung oleh seluruh penduduknya dari bayi hingga lanjut usia, maka tiap-tiap kepala harus menanggung hutang sebesar 7 juta rupiah. Lemahnya sistem hukum dan rendahnya moralitas penyelenggara pemerintahan dan hukum membuat korupsi ini semakin gemuk dan sulit diberantas, karena melibatkan berbagai unsur dari hulu hingga hilir. Padahal dampak kebobrokan tindakan ini harus ditanggung seluruh rakyat yang mayoritas masih miskin.

Sisi yang kini juga telah mengalami penetrasi Kapitalisme adalah pendidikan. Pendidikan diorientasikan bagaimana agar peserta didik mampu menghadapi tantangan kerja. usaha paling utama untuk memenuhi kebutuhan ini adalah memformat kurikulum agar cocok dengan kebutuhan ekonomi Kapitalistik. Pembangunan yang kapitalistik telah mengantarkan lembaga pendidikan sebagai institusi yang berorientasi ganda, yaitu pengabdian dan keuntungan. Pendidikan biaya tinggi adalah salah satu dampak dari kapitalisasi pendidikan ini, disamping juga rendahnya alokasi anggaran pengeluaran untuk sektor pendidikan dari pemerintah. Padahal pendidikan yang dituntut oleh situasi saat ini adalah pendidikan yang membuat manusia berani membicarakan masalah-masalah lingkungan dan turun tangan dalam lingkungan tersebut, pendidikan yang mampu memperingatkan dari bahaya jaman dan memberikan kekuatan untuk menghadapi bahaya tersebut. Bukan pendidikan yang menjadikan akal menyerah dan patuh terhadap putusan orang lain.

Gerakan Islam mengalami kelumpuhan menghadapi fenomena tragis ini karena terjadinya krisis keyakinan yang merata pada semua komunitas. Kata kuncinya adalah, *umat Islam telah kehilangan kesadaran bahwa kalimat keadilan dan pemerataan menjadi wahyu yang harus diturunkan menjadi bahasa aksi*. Gerakan Islam kurang mampu memotivasi pengikutnya untuk keluar dari krisis identitas sebagai bangsa yang merdeka. Akibat dari ketidakmampuan menyusun bahasa aksi dan selalu menggunakan pendekatan normative maka ketika menghadapi tantangan mudah sekali terjatuh pada sikap pragmatis. Pragmatisme itu pula yang menyebabkan gerakan Islam tidur pulas dalam ketidaksadaran ketika kekejaman gerak modal terjadi pada umat.

Usaha-usaha pengembangan kesadaran kritis terhadap posisi negara banyak diabaikan oleh gerakan Islam. Evolusi kaum terdidik Muslim sehingga menempati posisi sebagai bagian dari kelas menengah ternyata hanya mengukuhkan hasrat yang tempramen gerakan pembaharuan pada bidang-bidang yang sangat sektoral. Gerakan Islam miskin akan kecakapan dalam melakukan reorganisasi kekuatan demi membela umat yang tertindas. Secara paradoks sejarah menunjukkan bagaimana korban Tanjung Priok, Lampung, Aceh, surut dari perhatian kaum pembaharu maupun ormas Islam yang besar, seperti NU dan Muhammadiyah.

Strukture sosial dimana modal tumbuh dan berkembang kurang mendapatkan perhatian serius dari kaum intelektual Islam. Kecilnya perhatian ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya:

1. Pandangan umat Islam yang terlalu terpujau dengan gagasan-gagasan modern yang terang-kum dalam ideologi pembangunan. Keyakinan bahwa satu-satunya cara untuk maju dengan mengikuti resep ekonomi pertumbuhan telah mendorong banyak kaum intelektual Muslim untuk lebih memfokuskan pada bagaimana modal kultural dari masyarakat industri harus tertanam.
2. Tidak memiliki alat abantu yang memadahi apalagi pertumbuhan pemikiran yang mencoba untuk melakukan pendekatan struktural banyak diabaikan. Gagasan pemikiran Islam lebih terjebak dan termotivasi untuk menanggapi isu-isu yang sementara, sehingga selalu mengalami ketertinggalan ketika gerak masyarakat begitu kencang. Keasyikan pembaharuan teologi keagamaan juga telah mengaburkan wacana praksis yang justru erat dengan kehidupan umat.

3. Lemahnya kesadaran kritis atau rendahnya pengawasan pada kekuasaan negara. Padahal modal sebagai entitas kekuasaan mempunyai kewenangan informal yang jauh lebih perkasa ketimbang negara, sebab negara telah dikooptasi oleh kepentingan modal itu sendiri.

Untuk itulah diharapkan pola pemikiran keagamaan yang sedekat mungkin memiliki hubungan erat dengan praksis sosial ekonomi masyarakat sehari-hari; sehingga makna wahyu sebagaimana dinyatakan oleh pendekatan transformatif, harus menemukan tempatnya dalam proses sosial. Inilah hakekat Islam kiri yang memilih perubahan revolusioner sebagai cara perubahan. Islam yang melihat bahwa *pembasmian tatanan yang timpang adalah tugas prioritas dan sejajar dengan maksud turunnya agama*. Islam kiri mengambil perhatian utama bahwa substansi ketidadilan bukan semata karena kondisi internal melainkan yang jauh lebih penting adalah faktor keterkaitan dengan konteks internasional.

Untuk mampu menjadi gerakan yang luas dan mendapat dukungan, Islam kiri perlu merintis beberapa praktek yang akan mendekatkannya pada tujuan utama; terciptanya tatanan keadilan. Disinilah pentingnya merumuskan gerakan Islam kiri dalam beberapa praktek yang relevan dan memungkinkan untuk diterapkan pada masa pemerintahan yang transisi berbaur fasis saat ini:

1. Gerakan Islam perlu melakukan langkah advokasi terhadap pembelaan umat tertindas. Dalam manajemen dakwah, advokasi adalah jurus ampuh yang mampu menggantikan tuntutan abstrak menjadi konkret, mendorong ummat menggantikan kesadaran ideologi dengan ilmu sekaligus kesadaran subyektif umat menjadi kesadaran obyektif. Kesadaran ideologi membuat umat menjadi tertutup dan mudah dirangsang kecurigaannya sehingga selalu memandang diri sebagai yang paling benar. Advokasi menjadi alat penekan efektif umat terhadap elit politik yang sering mengatasnamakan perjuangan untuk Islam. Pada dasarnya kerangka kerja advokasi yang perlu diperhatikan, meliputi; perumusan teologi pemihakan yang dapat diartikulasikan secara meluas.
2. Pada saat yang sama gerakan Islam masih mengalami kelemahan baik secara ekonomi maupun politik. Dalam lingkup kerja yang luas gerakan Islam perlu melakukan penataan sistematis melalui jaringan kerja internasional yang lebih

terlembaga. Bentuk kerja sama ini meliputi bidang-bidang strategis yang mampu menjawab keluhan-keluhan umat.

3. Kemudian Islam kiri juga perlu menggali potensi media sebagai institusi pembentuk opini. Perluasan pengaruh yang diciptakan oleh media massa secara progresif telah merangsang pergeseran kekuasaan kelembagaan yang menjauh dari masjid dan lembaga agama, yang sebelumnya berperan dalam mengontrol arus gagasan dan informasi, menuju pusat-pusat dan jaringan simbolis dan budaya baru. Dalam konteks ini kita menyaksikan betapa media memiliki kemampuan dan pengaruh sosial yang luar biasa, khususnya dalam menentang wewenang kelembagaan yang telah mapan. Gambaran yang dibuat media mampu membangun *stereotip*. Yaitu suatu pola tertentu sebagai hasil cetakan yang muncul mengenai gambaran realitas yang ada. Labelisasi terhadap gerakan Islam yang mengarah kepada image buruk semisal kelompok garis keras, teroris, dan fanatik, kebanyakan juga ulah dari media yang kontraproduktif terhadap gerak Islam. Industri media memang merupakan bentuk perusahaan komersial yang diorganisir menurut garis kapitalis. Media harus diarahkan kepada pelurusan dan pemberitaan atas realitas tanpa suatu tendensi apapun. Tumbuh pesatnya media harus dikontrol dengan media yang sejajar posisi tawarnya untuk membangun opini masyarakat. Pesatnya pertumbuhan media telah meluluhlantakkan budaya baca. Budaya buku yang sesungguhnya mampu melatih kemampuan berfikir sistematis dan dalam telah dirusak oleh budaya gambar. Peran gambar telah menggeser budaya wacana verbal tekstual. Media semacam ini telah membawa pesan-pesan mutakhir barat yang mendorong perubahan seksual (*sexual permissiveness*), perilaku agresif (*agresiveness*), konsumerisme dan sekulerisme. Penetrasi nilai-nilai ini telah menempatkan kedudukan media, menjadi “tirani kognitif”.
4. Selanjutnya, ketrampilan teknokratis perlu dikembangkan kemampuannya agar sejajar dengan lembaga pembuat kebijakan. Disini gerakan advokasi yang dilakukan selain melayani kebutuhan untuk mengkritisi sebuah peraturan juga dapat memfasilitasi pembuatan *legal draft*.

Dari beberapa langkah diatas, Gerakan advokasi diharapkan mampu memberi peran pembebasan kesadaran kalangan Muslim, dari kesadaran magic dan naïf menjadi kesadaran kritis. Berdasarkan pada model gerakan advokasi ini, setidaknya ada dua pilihan yang dapat diraih umat Islam, yaitu *pertama* secara material membuktikan bahwa Islam memang rahmat bagi seluruh alam, karena dalam gerakan advokasi sasarannya bukan lagi siapa beragama apa melainkan mereka yang tertindas oleh ketidakadilan, maka wajib untuk dibela. *Kedua*, mewujudkan cita-cita kemanusiaan, yakni terbangunnya keadilan. Karena kekuatan hukum bnergantung pada jangkauan keadilan. Dalam kaitan inilah maka menarik jika gerakan Islam terlibat aktif dalam proses pembelaan hukum sebagaimana yang terangkum dalam gerkan advokasi. Gerakan advokasi tidak semata memberi bantuan hukum, melainkan mencoba melakukan perombakan tertib sosial yang lebih mendasar.

WACANA ISLAM KIRI: ARAHAN MENUJU ISLAM PROGRESIF

Berikut ini adalah perbedaan yang perlu dipahami antara Islam kiri dengan model Islam knservatif:

ISLAM KONSERVATIF	ISLAM KIRI
Orientasi pada jaminan kehidupan yang mapan, stabil dengan menyesuaikan spirit keagamaan pada modernitas dan pembangunan.	Orientasi pada perubahan struktur sosial yang menindas dan menyingkap segala bentuk kejahatan pembangunan.
Mendorong agama untuk menjadi urusan privat dan tidak diperlukan untuk menjawab semua masalah sosial.	Mendorong agama sebagai kekuatan pembebas terutama bagi pemeluk yang terancam secara sosial oleh sistem ekonomi dan politik yang destruktif.
Mengadaptasikan semua perangkat ajarannya agar sesuai dengan sistem	Mengadaptasikan semua perangkat ajarannya untuk membongkar semua

<p>ekonomi pasar bebas, sistem politik yang “demokratis” dan sistem sosial yang pluralistic.</p>	<p>sistem politik, sosial, dan kebudayaan yang mengalienasi kelompok miskin dan sistem yang telah mendorong adanya diskriminasi.</p>
<p>Melihat semua akar persoalan pada pemahaman literer dan absolut kalangan agamawan terhadap wahyu Tuhan.</p>	<p>Melihat akar persoalan ada pada sistem politik dan ekonomi dunia yang memang sejak semula tidak adil dan berpihak pada kepentingan kaum pemodal.</p>
<p>Menempatkan Islam sama dengan agama-agama lainnya dalam artian sama-sama menyuruh saling bersikap kasih sayang, toleransi dn terbuka.</p>	<p>Menempatkan Islam sebagai agama wahyu terakhir yang pertama-tama berorientasi pada pembasmian penindasan ekonomi dan dalam kondisi yang dipersyaratkan memperkenankan dipakainya kekuatan fisik demi tegaknya keadilan.</p>
<p>Pemuka keagamaan adalah intelektual borjuis yang memiliki prasyarat pengetahuan agama yang mendalam dan kalau perlu lulusan sekolah tinggi agama.</p>	<p>Pemuka agamanya banyak berasal dari kalangan miskin dan tertindas.</p>

Islam kiri menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar bagi dirinya tk membangun gerakan yang progresif dan mencerahkan kehidupan umat. Beberapa ayat yang sangat menunjukkan pemihakan Islam terhadap kaum tertindas diantaranya adalah:

PRINSIP	MAKNA	AYAT QUR'AN TERKAIT
<p>☞ Melawan</p>	<p>Islam memusuhi</p>	<p>QS 4:7; QS 8:39; QS</p>

segala bentuk penindasan dan kesewenang-wenangan.	kaum yang mengeksploitasi kelompok miskin.	4:148; QS 7:137; QS 9:103; QS 22:39; QS 2:190; QS 9:36; QS 2:191; QS 59:7-8; QS 89:6-14.
⌘ Menentang monopoli ekonomi dan Kapitalisme.	Islam melarang penimbunan kekayaan dan tradisi konsumtif.	QS 104:6-8; QS 7:31; QS 59:7; QS 9:34; QS 2:129; QS 2:275-278; QS 30:39; QS 104:1-4; QS 7:31; QS 57:7; QS 51:19; QS 2:190; QS 6:142; QS 10:12,83; QS 21:9; QS 26:151; QS 51:34; QS 42:5; QS 44:31.
⌘ Membela kaum lemah dan tertindas.	Islam menyuruh orang beriman untuk membela kelompok lemah serta larangan untuk menganiaya mereka.	QS 17:16; QS 28:5; QS 4:75; QS 62:2; QS 22:45; QS 107:1-3; QS 2:264; QS 42:8.
⌘ Menegakkan keadilan dan prinsip pemerataan.	Islam mengutuk sistem hukum, sosial, ekonomi, politik yang tidak adil & menempatkan parameter ketaqwaan pada sejauh mana menegakkan keadilan.	Qs 7:29; QS 4:135; QS 5:8; QS 9:34; QS 55:8-9; QS 11:84-85; QS 2:188; QS 2:275; QS 2:278-279.

Islam secara normal mengakui kebebasan berusaha dengan lembaga kepemilikan pribadi, sistem pemasaran dan keuntungan. Akan tetapi ia berbeda dengan Kapitalisme,

karena hak milik dalam Islam bukan seluruhnya—baik dalam esensi maupun materi—milik pribadi. Ada sebagian harta yang menjadi hak bagi golongan masyarakat lain sebagai manifestasi tanggung jawab sosial, yaitu golongan lemah yang membutuhkan (*mustadz'afin*). Prinsip tersebut dikenal dalam Islam melalui mekanisme zakat, sedekah, dan infaq.¹ Dengan cara pandang yang demikian Islam mensyaratkan kepemilikan pribadi tidak semata-mata digunakan untuk memenuhi kebutuhan, melainkan juga harus berfungsi sosial. Kepemilikan tidak hanya bergulir dalam rotasi kelompok kaya dan pemilik modal saja, tetapi alur distribusinya juga harus merambah ke kalangan miskin dan lemah.² Kecenderungan monopolistik dan kapitalistik tidak dibenarkan dalam Islam karena hal itu akan berimplikasi pada perampasan hak orang-orang miskin, seperti menumpuk harta, kikir, dan penguasaan sumber ekonomi oleh kelompok kecil masyarakat.³

Dalam Islam, terjadinya praktek penindasan merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok-kelompok yang terlibat dalam penindasan itu. Dalam mencapai perubahan sosial, Al-Qur'an sendiri tidak membangkitkan kesadaran kelas, tetapi kesadaran humanistik yang berdiri di atas egalitarianisme. Oleh sebab itulah baik penindas maupun tertindas sama-sama bertanggung jawab atas praktek-praktek sistem yang tak adil. Penindas bersalah karena arogansi dan kekuasaannya. Sebaliknya orang yang tertindas juga menjadi bersalah jika mereka hanya diam tidak melakukan perlawanan. Jika hal tersebut terjadi, dikhawatirkan

¹ Zakat, infaq dan sedekah adalah sebagian pilar Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an menekankan urgensinya bagi penegakan keadilan sosial. *"dan dalam kekayaan mereka terdapat bagian (hak) semestinya bagi orang-orang yang berkekurangan dan miskin"*, (QS. Adz-dzariyat:19). Kemudian dalam ayat 107, *"tabkalah kamu orang yang mendustakan agama?, yaitu yang menyingkirkan yatim piatu dan tidak menyuruh manusia untuk memberi makan orang-orang berkekurangan. Celakalah orang yang shalat tetapi tidak peduli dengan shalatnya; yaitu memamerkan kesalehan tetapi tidak memberi sedekah kepada orang miskin."*

² Konsep ini dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7, *"...supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja."* Dalam ayat lain juga disebutkan, *"dalam harta mereka (orang-orang kaya) terdapat hak orang miskin yang meminta-minta serta mereka yang tidak mendapat bagian."* (QS. Ad-dzariyat:19).

³ Wacana tersebut disandarkan atas Al-Qur'an surah Al-Humazah ayat 104, *"Kecelakaan bagi orang yang menumpuk harta dan kikir."* Kemudian dalam ayat lain secara lebih ekstrim juga disebutkan, *"Kepada orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menggunakannya untuk kepentingan terlaksananya agama Allah, beritabukanlah adanya siksa yang berat. Pada suatu hari (kiamat) emas dan perak mereka dipanaskan di neraka jahannam, kemudian para pemiliknya akan diseterika dengannya pada dahi, lambung, dan pinggang mereka; seraya dikatakan pada mereka: inilah harta yang telah kamu timbun untuk kepentinganmu itu, maka rasakanlah sekarang (siksa) akibat dari apa yang kamu timbun itu."* (QS. At-Taubah:34-35).

status quo penindasan akan terus berjalan dan kaum tertindas akan digiring ke dalam rekayasa para penindas.⁴

Kelumpuhan Islam untuk mewujudkan ajaran fundamental yang revolusioner tersebut di atas disebabkan oleh beberapa faktor, seperti *pertama*; arus kapitalisme modal yang telah menciptakan tatanan dunia penuh dengan aturan dan berpihak kepada kepentingan modal. *Kedua*, mudurnya kepedulian dan solidaritas umat Islam terhadap kaum lemah.

Dalam konteks yang lebih operasional, gerakan Islam kiri hendak memfokuskan tiga tiang utama:

1. Ilusi kemakmuran global yang dibawakan oleh sistem perdagangan internasional perlu diawasi dan dilakukan upaya counter. Mekanisme perdagangan internasional yang digagas oleh GATT maupun WTO hanya berakibat lacurnya asset kekayaan negeri Muslim pada negara-negara besar.
2. Islam kiri menentang sistem hukum yang diskriminatif dan mengelabui rakyat tentang arti kepastian dan keadilan hukum. Islam kiri mendesak agar semua kejahatan manusia dipertanggungjawabkan secara transparan didepan hukum dan diketahui publik.

Sebagai benang merahnya, Eko Prasetyo dalam buku ini tidak berarti mengajak pembaca untuk mendikotomikan Islam kedalam sekat-sekat terpisah antara status quo dan reformis, kekonservatif dan kiri atau penggolongan lainnya. Nilai penting buku ini adalah upaya untuk merombak tatanan doktrin Islam menjadi lebih hidup dan membumi. Bahwa dalam wahyu Al-Quran terdapat banyak ajaran yang sangat esensial namun masih sering dilupakan oleh ummat Islam sendiri. Bahwa bangunan Islam perlu ditegakkan di atas segala permasalahan social kemasyarakatan. Gagasan dalam buku ini hendak meletakkan kembali posisi Islam sebagai gerakan alternatif. Buku ini mengajak untuk melakukan penyelaman sudut pandang islam dari sisi yang masih tak berdaya agar mampu tampil lebih kritis, memberdayakan dan mampu menjawab tantangan zaman, sebagaimana Islam yang dibawakan para nabi terdahulu yang selalu menempatkan diri sebagai gerakan

⁴ Lihat Jaluddin Rakhmat, "Perjuangan Mustadz'afin: Catatan Bagi Perlawanan Kaum Mustadz'afin", dalam Eko Prasetyo, *Islam Kiri*, opcit. Hal.320.

perlawanan atas berbagai ketimpangan, kezaliman, dan kebobrokan system yang mencuat dalam masyarakatnya.

Buku ini mencoba untuk mengkonstruksi Islam sebagai alternatif atas gurita kapitalisme global berikut implikasinya terhadap dehumanisasi umat manusia, pelanggaran HAM, pelecehan budaya, serta kekerasan dalam beragam wajah. Gagasan dalam buku ini diharapkan dapat menciptakan ruang untuk refleksi bagi golongan islam yang hendak meletakkan kembali posisi Islam sebagai gerakan alternatif.

Review buku oleh: Eko Supriyadi